

PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DAN HARMONI SOSIAL DI BALI MELALUI KEARIFAN LOKAL MENYAMA BRAYA

PEACEBUILDING AND SOCIAL HARMONY IN BALI WITH THE LOCAL WISDOM MENYAMA BARAYA

Isrotul Fajriyah¹

Letjen TNI I Wayan Midhio

Supandi Halim

Abstract - Bali has been known as an ethnic which has peaceful image, however, this is not a guarantee that Bali is conflict free province in terms of the people and its plurality as well. This article is aimed at analyzing the utilization of local wisdom in Balinese society, that is, *menyama braya* in creating peaceful and harmonious society. Local wisdom is part of Bali's cultures which function as fundamental concepts thereby maintaining and building strong social relation to get rid of potential conflict. The notions of *menyama braya* correspond with the values of culture of peace and can be social capital to build community resilience. This article also denotes that stakeholders are the important elements to formulate the strategy of conflict prevention. Stakeholders are also utilize *menyama braya* to keep maintaining social stability towards racism, furthermore it function as precaution in terms of achieving peaceful and harmonious society.

Keywords: *menyama braya*, social capital, local wisdom, culture of peace, community resilience, CEWERS, conflict prevention and conflict resolution

Abstrak - Bali telah dikenal sebagai provinsi yang cinta damai, namun ini bukan jaminan bahwa Bali adalah juga provinsi bebas konflik dalam hal masyarakat dan pluralitasnya. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu “*menyama braya*” dalam menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya Bali yang berfungsi sebagai konsep dasar sehingga menjaga dan membangun hubungan sosial yang kuat untuk menyingkirkan potensi konflik. Gagasan “*menyama braya*” sesuai dengan nilai budaya damai dan bisa menjadi modal sosial untuk membangun ketahanan masyarakat. Makalah ini juga menunjukkan bahwa pemangku kepentingan merupakan elemen penting untuk merumuskan strategi pencegahan konflik. Pemangku kepentingan juga memanfaatkan “*menyama braya*” untuk tetap menjaga stabilitas sosial terhadap rasisme, selain itu berfungsi sebagai tindakan pencegahan dalam mencapai masyarakat yang damai dan harmonis.

Kata kunci: *Menyama braya*, modal sosial, kearifan lokal, budaya damai, ketahanan komunitas, CEWERS, pencegahan dan resolusi konflik

¹ Penulis adalah alumnus Universitas Pertahanan Program Studi Damai dan Resolusi Konflik

Pendahuluan

Bali tidak hanya dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia, namun juga lekat dengan citra damai dan harmonis yang terbentuk secara kuat sejak era kolonial Belanda melalui kebijakan *rust en orde* (perdamaian dan ketertiban). Masyarakat Bali yang menentukan identitas Kebalian berdasarkan adat, agama, dan budaya mengenal falsafah *Tri Hita Karana* yang menekankan keseimbangan hidup antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), antar sesama manusia (*pawongan*), dan antara manusia dengan alam (*palemahan*). Meski demikian, masyarakat Bali pada dasarnya bukanlah masyarakat yang bebas konflik sama sekali. Di balik citra Bali yang damai dan harmonis, masyarakat Bali menyimpan potensi konflik yang bersumber dari berbagai faktor, mulai dari adat, budaya, ekonomi, politik, maupun dari kondisi sosial masyarakat Bali yang plural.

Permasalahan adat seperti mengalih *soroh*, pembentukan desa pakraman baru, dan pelarangan penggunaan kuburan kerap menjadi sumber konflik yang melibatkan antar sesama masyarakat Bali. Konflik antar

sesama masyarakat Bali juga dapat terjadi karena faktor politik yang melibatkan massa pendukung partai politik. Hal tersebut dicontohkan dengan bentrokan antara Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng dengan Desa Pedawa, Kecamatan Banjar yang turut menewaskan warga pengurus Partai Golkar di Desa Petandakan pada tahun 2003.² Sementara itu, perebutan akses politik dan ekonomi pada suatu wilayah di Bali juga kerap diikuti oleh sentimen adat.

Di sisi lain, Bali saat ini dihuni oleh masyarakat plural yang terdiri dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Pluralitas masyarakat Bali sebenarnya telah terbentuk sekian lama sejak era kerajaan. Pada mulanya, umat Muslim datang ke Bali sebagai pengawal raja-raja Bali, seperti pengawal Majapahit beragama Islam yang mengiringi kepulangan Raja Gelgel Dalem Ketut Ngelisir pada abad ke-14 dan pengawal Muslim Blambangan yang turut menyertai I Gusti Ngurah Panji Sakti. Masyarakat dari berbagai etnis, seperti Tionghoa, Arab, dan Bugis masuk ke Bali melalui interaksi dagang di sejumlah wilayah

² I Ngurah Suryawan, *Bali, Narasi dalam Kuasa: Politik & Kekerasan di Bali*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2005

pelabuhan seperti pesisir Buleleng. Migrasi orang-orang Sasak dari Lombok di Karangasem bahkan membentuk perkampungan Islam yang mengelilingi Puri Karangasem dan difungsikan sebagai benteng besar pertahanan kerajaan.³ Pesatnya industri pariwisata di Bali menjadi faktor lain yang mendorong para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menetap dan memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia sehingga masyarakat Bali saat ini menjadi masyarakat multikultur.

Di Bali, para pendatang Islam tidak hanya memasuki ranah nafkah yang diusahakan oleh penduduk asli Bali, namun juga memanfaatkan lowongnya sektor ekonomi informal yang kurang diminati penduduk asli. Mereka dikenal memiliki sifat ulet, pekerja keras, dan semangat kewirausahaan yang tinggi sehingga menyebabkan penduduk asli kalah bersaing dan terpinggirkan secara ekonomi.⁴ Kondisi semacam ini dapat membentuk kesenjangan sosial ekonomi yang dapat menjadi faktor struktural

penyebab konflik. Masyarakat Bali yang multikultur dengan problema sosial ekonomi tersendiri sangat rentan terhadap ancaman konflik yang dapat menghancurkan integrasi sosial sehingga perlu ada mekanisme pencegahan dan resolusi konflik yang tepat.

Pada dasarnya, masyarakat Bali memiliki mekanisme tradisional pencegahan dan resolusi konflik tersendiri, yakni dengan memanfaatkan keberadaan desa pakraman yang memang berdasarkan Perda No. 3/2001 memiliki tugas untuk membina kerukunan dan berwenang menyelesaikan sengketa adat. Di sisi lain, masyarakat Bali juga mengenal banyak kearifan lokal, salah satunya adalah *menyama braya* yang dapat diartikan sebagai persaudaraan yang erat di mana masyarakat Bali menganggap orang non-Bali yang beragama non-Hindu pun sebagai saudara, sehingga dikenal istilah seperti *nyama Selam* (saudara Islam), *nyama Cina* (saudara Cina), *nyama Kristen* (saudara Kristen), dan lain-lain. Kearifan lokal ini merupakan modal sosial yang dapat memperkuat solidaritas dan merekatkan hubungan masyarakat multietnis dan multiagama sehingga konflik yang rentan terjadi pada masyarakat plural dapat dihindari. Selain keberadaan pranata

³ Slamet Trisila, "Masyarakat Islam di Bali dalam Lintasan Historis", dalam A.A.A. Dewi Girindrawardani, Trisila, Slamet (ed), *Membuka Jalan Keilmuan Kusumanjali 80 Tahun: Prof. Dr. Anak Agung Gde Putra Agung, S.U.*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2015

⁴ Nengah Bawa Atmadja, *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*, LKIS, Yogyakarta, 2010

sosial desa pakraman dan kearifan lokal *menyama braya*, pemangku kepentingan (*stakeholders*) menjadi aktor yang berperan penting dalam upaya mewujudkan perdamaian dan harmoni sosial karena *stakeholders* inilah yang dapat merumuskan strategi pencegahan dan resolusi konflik yang tepat.

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kearifan lokal *menyama braya* dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan perdamaian dan harmoni sosial di Bali. *Menyama braya* mengandung budaya damai dan dapat menjadi modal sosial masyarakat Bali dalam membentuk ketahanan masyarakat terhadap konflik. Tulisan ini juga bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang peran pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa pakraman hingga pemerintah kota yang dalam fokus tulisan ini adalah Denpasar dalam pencegahan dan resolusi konflik terutama dengan memanfaatkan modal sosial yang sudah tersedia pada masyarakat, yakni kearifan lokal *menyama braya*.

Menyama Braya: Kearifan Lokal Masyarakat Bali yang Berbudaya Damai

Kearifan lokal merupakan suatu kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang

dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mempertebal kohesi sosial.⁵ Indonesia merupakan negara plural di mana setiap daerah menganut kearifan lokal tersendiri sebagai suatu perangkat pengetahuan dan praktik suatu komunitas, baik berasal dari generasi sebelumnya maupun pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lain untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan kesulitan yang dihadapi. Menurut Sartini kearifan lokal secara umum dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, dan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.⁶ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka kearifan lokal dapat dijadikan acuan oleh suatu masyarakat dalam berperilaku dan menjadi filter kultural dalam menjaga marwah ikatan sosial.

Menurut Malik kearifan lokal merupakan modal sosial potensial yang dimiliki oleh masyarakat untuk

⁵ John Haba, "Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso", dalam Irwan Abdullah, Ibnu Mujib, dan M. Iqbal Ahnaf (ed), *Agama dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

⁶ Putri Amal Wijayanti & Ali Rokhman, "Kearifan Lokal sebagai Bagian dari Demokrasi dan Pembangunan di Indonesia", dalam Seminar Nasional FISIP-UT, 2011

diaktualisasikan dalam resolusi konflik. Hal ini berarti bahwa kearifan lokal dapat dimanfaatkan bukan hanya sebagai panduan dalam interaksi sosial masyarakat tapi juga dalam mewujudkan perdamaian dan harmoni sosial. Gagasan-gagasan kearifan, kebijaksanaan, dan kebaikan yang terkandung dalam kearifan lokal juga dapat menjadi modal bagi masyarakat untuk mencegah konflik yang mungkin muncul dari hubungan sosial. Pencegahan konflik melalui pendekatan tradisional biasanya segera fokus pada dinamika konflik dan intervensi yang dilakukan seharusnya mampu mengidentifikasi ketidakpuasan, baik yang bersifat laten maupun telah menimbulkan ketegangan dan berpotensi meledakkan konflik.⁷

Kearifan lokal *menyama braya* yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Bali telah dikenal oleh masyarakat Bali sejak dahulu, bahkan jauh sebelum konsep *Tri Hita Karana* dilahirkan pada tahun 1966. Kearifan lokal ini tetap lestari dalam relasi sosial masyarakat Bali hingga kini. *Menyama braya* berasal dari istilah *nyama*, yakni saudara yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan, dan

braya yang bermakna masyarakat atau komunitas tempat hidup bermasyarakat orang Bali dengan tingkat terkecil adalah *banjar*. Dalam kearifan lokal *menyama braya*, masyarakat Bali menganggap orang lain yang bahkan tidak memiliki hubungan persaudaraan sedarah pun sebagai bagian dari keluarga atau komunitas.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Bali, terdapat sesanti-sesanti yang memperkuat *penyamabrayaan* masyarakat, seperti *pasukadukan* (suka dan duka dimiliki bersama), *paras paros sarpanaya* (guyub dan selalu melakukan musyawarah untuk mufakat), *sagilik saguluk* (tetap bersatu padu dengan kokoh), *salunglung sabayantaka* (sedapat mungkin selalu dalam kebersamaan dan saling menghargai), dan *briuk sapanggul* (terdorong oleh jiwa sama tinggi dan sama rendah, saling tolong menolong). Pada dasarnya, sesanti-sesanti tersebut bersumber dari agama Hindu yang mengenal ajaran *Tat Twam Asi* yang bermakna ‘saya adalah kamu, kamu adalah saya’ sehingga jika saya menyakiti kamu, maka saya menyakiti diri sendiri. Ungkapan yang lebih luas lagi dalam Hindu adalah *Vasudewam Khutumbhakam* yang bermakna kita semua bersaudara. Artinya, tidak ada batasan agama, suku,

⁷ Ho Won Jeong, *Understanding Conflict and Conflict Analysis*, SAGE Publications Ltd, London, 2008

maupun ras karena semua manusia adalah saudara.

Sesanti-sesanti yang membentuk kuatnya *menyama braya* tersebut mengandung nilai-nilai solidaritas dan kerjasama yang selaras dengan prinsip budaya damai dalam Resolusi PBB A/RES/53/243. Persaudaraan yang erat pada masyarakat Hindu di Bali dibuktikan dengan adanya gotong royong dalam suka maupun duka. Dalam berbagai upacara agama, masyarakat Hindu di Bali terbiasa untuk guyub dan saling tolong menolong satu sama lain. Kegiatan semacam ini merupakan perwujudan dari rasa persaudaraan yang dapat mempertebal kohesi sosial. Selain itu, prinsip toleransi, kebebasan, menerima pluralisme dan keragaman budaya, serta penghormatan penuh terhadap HAM dan kebebasan fundamental juga terkandung dalam *menyama braya*. Pengakuan sebagai saudara terhadap orang-orang dari etnis dan agama lain dalam *menyama braya* yang memunculkan istilah seperti *nyama Selam* memungkinkan masyarakat untuk hidup saling toleran, menghormati kebebasan beragama umat lain, dan saling bekerjasama.

Hal tersebut dibuktikan oleh masyarakat Desa Pemogan di Denpasar Selatan yang multikultur namun dapat

hidup secara damai dan harmonis. Desa Pemogan yang terdiri dari dua desa pakraman, yaitu Desa Pakraman Pemogan dan Desa Pakraman Kepaon merupakan potret masyarakat Bali multikultur yang dihuni oleh penduduk dari berbagai etnis dan juga agama, yaitu Hindu, Islam, Kristen, Katholik, Budha, dan Konghucu. Masyarakat yang multi-agama tersebut dapat hidup berdampingan tanpa saling mengganggu keyakinan masing-masing. Mereka hidup saling berbaur tanpa ada segregasi sosial dan dapat menjalankan kegiatan ibadah dengan nyaman dengan adanya rumah-rumah peribadatan yang ditujukan untuk semua agama. Masyarakat Islam dan Kristen misalnya tetap dapat menjalankan kegiatan agama mereka di Masjid maupun Gereja yang terletak di tengah-tengah pemukiman warga Hindu. *Menyama braya* pada masyarakat Pemogan dapat terlihat dengan adanya sikap toleran antar umat beragama ketika umat Hindu menjalankan brata penyepian. Umat non-Hindu turut menghormati Nyepi dengan tidak menyalakan lampu dan tidak menimbulkan keributan. Ketika Nyepi berbenturan dengan kegiatan agama lain, seperti misa, umat Katholik dapat bersikap fleksibel dengan membentuk

persekutuan dan beribadah di rumah. Ketika Nyepi berlangsung bersamaan dengan Sholat Jum'at pun umat Muslim tetap dapat menjalankan ibadah di masjid terdekat dengan berjalan kaki dan tidak membunyikan *speaker*. Demikian pula ketika Nyepi bersamaan dengan Natal dan Idul Fitri, setiap umat dapat bersikap toleran sehingga dapat mencegah timbulnya konflik yang terkait dengan isu-isu agama.

Perbedaan agama merupakan hal biasa yang telah dihadapi oleh masyarakat Desa Pemogan dalam jangka waktu yang lama karena di wilayah Desa Pakraman Kapaon terdapat Kampung Islam Kapaon, suatu enklave Muslim yang telah tinggal menggenarasi di wilayah tersebut dan berstatus sebagai penduduk *wed* atau penduduk asli. Dengan adanya *menyama braya*, penduduk Hindu dan Islam di Kampung Islam Kapaon terbiasa hidup saling toleran dan bekerjasama dalam suka maupun duka. Umat Hindu dan Islam di Desa Pemogan terbiasa untuk saling terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan, seperti umat Hindu turut serta dalam acara takbir keliling, pecalang membantu menjaga kelancaraan perayaan Idul Adha, dan umat Islam turut mengunjungi umat Hindu yang tertimpa musibah kematian

(*madelokan*). Hal tersebut membuktikan bahwa *menyama braya* pada masyarakat di Desa Pemogan telah melahirkan semangat gotong royong antar umat beragama. Masyarakat di Desa Pemogan juga masih menjalankan sejumlah tradisi yang menunjukkan *penyamabrayaan*, seperti *megibung*, yakni makan bersama dalam satu tempat dan *ngejot*, yakni saling berbagi makanan pada perayaan hari raya Galungan, Idul Fitri, dan Maulid Nabi. Pada perayaan Idul Adha pun pembagian hewan kurban tidak terbatas hanya pada penduduk beragama Islam, tapi juga turut diberikan kepada umat dari agama lain. Tradisi semacam ini merupakan implementasi dari *menyama braya* yang memperkuat ikatan sosial pada masyarakat plural dan membangun hubungan masyarakat yang harmonis.

Menyama braya dengan nilai-nilai luhur seperti solidaritas, toleransi, dan kerjasama dapat mempertebal kohesi sosial sehingga memungkinkan kekerasan dan konflik dapat dihindari oleh masyarakat. Dengan demikian, kohesi sosial yang tebal dengan fondasi *menyama braya* tersebut dapat berkontribusi dalam membangun apa yang disebut oleh Galtung sebagai *negative peace*, yakni kondisi tanpa perang dan kekerasan. Di sisi lain,

keberadaan kearifan lokal *menyama braya* dimana masyarakat Hindu di Bali dapat menerima kehadiran etnis dan agama lain serta memperlakukannya sebagai saudara sebenarnya mampu menghapus kekerasan sosiokultural seperti rasisme dan intoleransi kehidupan beragama. Meski masyarakat Bali mayoritas Hindu, masih ada keterbukaan untuk menerima kehadiran etnis lain dan kemampun untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan umat dari agama lain. Kekuatan persaudaraan, baik antar sesama etnis Bali beragama Hindu maupun antar etnis dan agama lain sudah sepantasnya dijadikan dasar untuk membangun kerjasama yang menguntungkan seperti dalam bidang ekonomi sehingga kekerasan struktural seperti kemiskinan dapat dikurangi. Meski mungkin *positive peace* masih belum dapat tercapai sepenuhnya hingga saat ini, namun setidaknya kearifan lokal *menyama braya* menjadi salah satu modal untuk membentuk *negative peace* dan menghapus kekerasan sosiokultural yang berkontribusi pada pembangunan *positive peace*.

Kearifan lokal *menyama braya* merupakan suatu budaya damai yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Bali. Dengan adanya kearifan lokal ini, muncul

persaudaraan yang kuat antar masyarakat di Bali, baik yang sesama etnis dan agama maupun yang berbeda etnis dan agama. Rasa persaudaraan yang kuat ini juga lah yang memperkuat solidaritas dan memunculkan toleransi hidup beragama sehingga masyarakat multikultur seperti yang ada di Desa Pemogan dapat hidup secara harmonis dan terhindar dari konflik SARA.

Menyama Braya sebagai Modal Sosial Pembangun Ketahanan Masyarakat terhadap Konflik

Modal sosial merupakan jejaring sosial yang memiliki nilai kebersamaan yang tumbuh dari suatu masyarakat, berupa norma resiprositas antar individu. Modal sosial dapat ditinjau dari tiga tingkatan, yaitu tingkatan nilai, institusi, dan mekanisme. Dalam tingkatan nilai, sebuah jaringan dapat terbentuk karena adanya latar belakang kepercayaan terhadap nilai yang sama, seperti agama, politik, keturunan, dan lain-lain. Di tingkatan institusi, jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi suatu institusi yang mana ada perlakuan khusus terhadap individu yang berada pada jaringan nilai sama untuk memperoleh modal sosial dari jaringan tersebut. Berikutnya, pada tingkatan mekanisme,

modal sosial yang telah terbentuk pada tingkatan pertama (nilai) dan kedua (institusi) mengambil bentuk kerjasama.⁸

Modal sosial pada masyarakat Bali dapat ditemukan dalam adat, nilai-nilai budaya lokal, serta kearifan lokal yang melekat erat pada setiap sendi kehidupan masyarakat. Adat, budaya, dan kearifan lokal inilah yang menjadi fondasi pembangunan ikatan sosial yang kuat pada suatu jaringan sosial, baik sesama etnis Bali yang beragama Hindu maupun dengan etnis dan agama lain. Dalam hubungan intra-etnis, *penyamabrayaan* yang dilatarbelakangi oleh kesamaan etnis, agama, adat, dan budaya merupakan modal untuk membangun apa yang disebut oleh Putnam sebagai *bonding* yang memperserat hubungan sosial dalam konteks *inward looking*.⁹

Adat, agama, budaya, maupun kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali dapat membentuk suatu jaringan sosial yang kuat mulai dari tataran nilai, institusi, dan mekanisme. Pada tataran nilai, jaringan sosial masyarakat Bali terbentuk secara kuat

karena adanya latar belakang agama yang sama, yaitu Hindu dengan sejumlah ajarannya tentang keselarasan hidup dengan Tuhan, manusia, dan alam; keturunan yang mengikat seseorang; dan profesi yang sama, seperti petani, nelayan, ataupun pedagang. Pada tingkatan institusi, jaringan sosial yang ada tersebut diorganisasikan melalui lembaga desa pakraman yang terbagi menjadi beberapa banjar pakraman di mana setiap krama adat Bali harus patuh dengan *awig-awig* yang ada, keberadaan pura kawitan (keluarga) yang wajib didatangi oleh anggotanya, dan lembaga profesi seperti organisasi subak. Dari *penyamabrayaan* yang terbentuk karena adanya kesamaan nilai dan terlembagakan secara institusi tersebut maka lahirlah kerjasama dalam bentuk gotong royong antara masyarakat Bali untuk memenuhi kebutuhan individu maupun sosial seperti pada upacara keagamaan, upacara kematian, dan perayaan hari raya. Kuatnya rasa persaudaraan yang terbangun pada masyarakat Bali ini berperan untuk mempertebal kohesi sosial sehingga masyarakat memiliki solidaritas dan tetap bersatu padu dalam berbagai keadaan, baik suka maupun duka sesuai dengan sesanti *pasukadukan* dan *briuk sapanggul*.

⁸ Adi Dewanto &, Rahmania Utari, "Pemberdayaan Modal Sosial dalam Manajemen Pembiayaan Sekolah", Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol. 3 No. 1, 2006

⁹ Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Simon and Shuster, New York, 2000

Sementara itu, eksistensi kearifan lokal *menyama braya* yang memandang etnis dan agama lain di Bali sebagai saudara dapat dimanfaatkan untuk apa yang disebut oleh Putnam sebagai *bridging* yang menjembatani hubungan sosial antar etnis dan agama sehingga tercipta toleransi dan kerjasama yang saling menguntungkan.¹⁰ Di Desa Pemogan, pemukiman warga tidak terkotak-kotakkan berdasarkan etnis dan agama sehingga kemajemukan warga dapat dijumpai di setiap banjar. Hal ini sangat mendukung terbukanya ruang komunikasi dan interaksi pada masyarakat yang berbeda etnis dan agama. Tradisi *ngejot* saat perayaan Galungan dan Idul Fitri yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Pemogan hingga saat ini berperan dalam membangun kedekatan sosial pada masyarakat yang saling berbeda agama dan menunjukkan adanya asas resiprositas dalam hubungan sosial. Rasa persaudaraan pada masyarakat multikultural pun membentuk ikatan dan rasa saling memiliki sehingga pelibatan masyarakat yang berbeda latar belakang etnis dan agama dalam berbagai kegiatan menjadi kebiasaan yang terus dijalankan,

seperti keterlibatan umat Hindu dalam takbir keliling dan Idul Adha.

Kearifan lokal *menyama braya* yang menekankan semangat persaudaraan memang dapat menjadi modal yang kuat dalam membangun solidaritas intra-etnis dan membangun kepercayaan terhadap etnis dan agama lain yang merekatkan hubungan sosial inter-etnis serta inter-agama. *Menyama braya* sendiri sesuai dengan falsafah bangsa, *Bhineka Tunggal Ika* yang menekankan persatuan dalam keragaman yang ada pada masyarakat. Persatuan yang dijiwai oleh semangat persaudaraan ini menjadi fondasi bagi pembangunan ketahanan masyarakat multikultur yang sangat rentan terhadap ancaman konflik.

Ketahanan masyarakat terhadap konflik memang sangat terkait dengan modal sosial yang membentuk kekuatan jaringan sosial dan *Conflict Early Warning and Early Response System (CEWERS)* dimana *stakeholders* memainkan peranan penting. Modal sosial merupakan salah satu dari klaster kapasitas ketahanan masyarakat selain pembangunan ekonomi, informasi dan komunikasi, dan kompetensi masyarakat dimana menurut Norris et al kualitas modal sosial terbagi menjadi *sense of community*, *citizen participation*, dan *place attachment*.

¹⁰ *Ibid*

Menyama braya sebagai kearifan lokal yang diyakini dan dipraktikan oleh masyarakat Bali memiliki kekuatan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan rasa memiliki pada desa serta komunitas yang kental. Ini artinya sebagai modal sosial, *menyama braya* memiliki kualitas untuk membentuk *sense of community* dimana masyarakat di suatu desa seperti di Desa Pemogan, misalnya tumbuh rasa saling memiliki meski terdapat perbedaan agama, terutama masyarakat Hindu dan Islam yang sudah hidup berdampingan sangat lama dan sama-sama memiliki identitas warga *wed*. *Sense of community* inilah yang menyebabkan ikatan sosial pada masyarakat menjadi lebih kuat. Terkait dengan *sense of community* tersebut, *menyama braya* juga menumbuhkan *place attachment* terhadap desa tempat mereka tinggal. Adanya lembaga genealogis pura kawitan yang turut membingkai *menyama braya* misalnya, juga membentuk *place attachment* yang mendorong anggota suatu keluarga untuk tetap kembali ke tempat asalnya sejauh apapun ia pergi.

Kualitas modal sosial yang terdapat dalam *menyama braya* tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun masyarakat yang tahan terhadap ancaman konflik, termasuk ketika bom

mengguncang Bali di tahun 2002 dan turut memakan korban umat Hindu dan Islam di Desa Pemogan. Peristiwa Bom Bali tahun 2002 merupakan kondisi yang sangat rentan terhadap provokasi dan perpecahan antar umat beragama di Bali karena pelaku pengeboman mengatasnamakan agama Islam. Meski demikian, masyarakat Bali dapat bertahan dari ancaman konflik antar umat beragama dan harmoni sosial tetap dapat terjaga karena *menyama braya* yang ada pada masyarakat masih kuat. *Sense of community* dan *place attachment* yang dihasilkan karena adanya *menyama braya* dimanfaatkan oleh para *stakeholders* untuk menggandeng tokoh seluruh agama untuk bersama-sama menonjolkan persatuan pada masyarakat sehingga masyarakat dapat menyaksikan bahwa kebersamaan itulah yang membuat mereka bertahan dan agar harmoni sosial yang sudah terpelihara dengan baik tetap terjaga. *Menyama braya* yang dimiliki oleh masyarakat Bali juga menghasilkan kohesi sosial yang tebal yang berfungsi sebagai *social enablers* untuk membangun ketahanan masyarakat dari ancaman konflik sehingga secara keseluruhan Bom Bali tidak memengaruhi hubungan sosial umat Hindu dan Islam di Bali. Peristiwa tersebut tidak sampai merusak

kepercayaan terhadap umat Islam yang sudah lama hidup berdampingan dengan umat Hindu meski kewaspadaan terhadap pendatang Islam memang mengemuka setelahnya.

Social enablers tersebut juga harus didukung oleh *procedural enablers* berupa strategi yang tepat dalam merespon situasi yang dapat menghasilkan gangguan pada masyarakat. Di sinilah perlunya CEWERS dan peranan aktif *stakeholders* dalam menjaga perdamaian. *Stakeholders* merupakan aktor penting yang dapat merumuskan strategi pencegahan dan resolusi konflik. Penanganan konflik memerlukan adanya aksi strategis dan responsif agar konflik yang sudah terjadi tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih buruk. Sementara itu, pencegahan konflik merupakan suatu upaya yang pro-aktif, bukan reaktif sehingga konflik dapat ditangani dengan cepat dan tepat tanpa terlambat.

Membangun Damai dan Harmoni Sosial dari Tingkat Desa hingga Kota

Upaya untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai dan harmonis dapat dilakukan dari tingkat terkecil, yaitu desa yang mana desa di Bali terbagi menjadi desa dinas dan desa

pakraman dengan sub terkecil adalah banjar. Dari tingkat desa, masyarakat harus sudah memiliki kewaspadaan dini agar senantiasa siap siaga mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan mencegah berbagai potensi konflik yang dapat menimbulkan perpecahan. Maka dari itu, CEWERS yang kuat sangat diperlukan sebagai upaya mencapai perdamaian dan harmoni sosial.

Jaringan CEWERS dapat dibangun dengan basis identitas. *Menyama braya* yang ada pada masyarakat Bali telah menyebabkan ikatan persaudaraan antar masyarakat dan rasa memiliki terhadap desa menjadi lebih kuat. Hal ini dapat menumbuhkan kepedulian untuk bersama-sama menjaga keamanan desa. Jaringan CEWERS berbasis identitas dapat ditemukan dari sistem pemerintahan desa yang terkecil, yaitu banjar. Banjar merupakan sub desa pakraman dimana krama banjar disatukan oleh adat dan diikat oleh *awig-awig* serta *perarem* dalam satu kelompok wilayah sementara relasi sosial dibangun atas dasar *menyama braya*. Dalam suatu banjar juga ada warga dinas yang tidak terikat secara adat dan agama, namun memiliki tanggungjawab untuk mematuhi aturan yang ada di banjar dan desa serta menjaga keamanan bersama.

Deteksi dini konflik dapat dimulai dari sistem banjar dimana banjar rutin mengadakan *paruman* untuk membahas persoalan adat, agama, maupun isu-isu lain yang dihadapi oleh masyarakat. Informasi sekecil apapun dapat segera diketahui oleh masyarakat karena adanya sistem perbanjaran dan mekanisme tradisional *kulkul*. *Kelian* dinas dan adat bekerja layaknya pasangan suami istri yang selalu mengutamakan komunikasi dan kerjasama dalam menjaga keamanan desa. Setiap permasalahan yang ada di banjar dapat disampaikan kepada *kelian* banjar agar segera ada tanggapan dini dan tidak terjadi perluasan konflik. Jadi, upaya penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat diutamakan untuk terselesaikan dahulu pada tingkat banjar dan dicegah agar tidak meluas hingga ke desa.

Menyama braya yang dimiliki oleh masyarakat Bali juga memungkinkan upaya pencegahan dan resolusi konflik secara inklusif dengan turut melibatkan tokoh lintas etnis dan agama. Di Desa Pemogan yang masyarakatnya heterogen, tokoh agama dan tokoh paguyuban etnis menjadi aktor penting yang turut berperan membangun kehidupan damai dan harmonis. Tokoh agama dan tokoh etnis ini dirangkul oleh

desa untuk dapat menanamkan pemahaman dan tanggungjawab terhadap umat maupun anggotanya dalam menjaga keamanan desa. Jika ada persoalan yang melibatkan masyarakat antar etnis, para tokoh paguyuban etnis berperan besar untuk segera meredam ketegangan karena mereka memiliki kekuatan untuk didengar oleh anggota etnis. Penyelesaian permasalahan pun dilakukan secara kekeluargaan dimana tokoh etnis dan desa dapat bersama-sama menyepakati *parum* yang harus dipatuhi oleh warga. Hal tersebut tentunya merupakan langkah yang tepat untuk menghindari konflik SARA pada masyarakat plural. Di Desa Pemogan, *menyama braya* yang kuat juga telah memungkinkan kegiatan keagamaan yang bersamaan berlangsung secara damai. Ini tidak terlepas dari peranan para tokoh agama yang dapat memberikan pemahaman kepada umatnya agar dapat menjaga toleransi. Setiap akan ada Nyepi, misalnya tokoh lintas agama dapat berdiskusi dan membuat kesepakatan yang kemudian disampaikan kepada warga sehingga meski beberapa kali Nyepi berbentrok dengan Natal, Sholat Jum'at, dan Idul Fitri, semua kegiatan dapat berlangsung khidmat tanpa saling mengganggu.

Pada tingkat desa pakraman, bendesa adat memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengatur krama adat, maka dari itu setiap hal yang terjadi di banjar perlu diinformasikan ke bendesa adat sehingga tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama akan selalu dapat berkoordinasi menjaga kedamaian dan keamanan. Dalam rapat adat di desa pakraman, banjar juga wajib mengirimkan perwakilan krama sehingga semua hal yang terjadi di banjar dapat diketahui oleh desa pakraman. Desa Pakraman juga memiliki tugas untuk membina kerukunan, menjaga toleransi, dan berwenang menyelesaikan sengketa adat yang terjadi pada warganya. Sementara itu, kepala desa dengan *kelian* dinas di setiap banjar bekerjasama menjaga keamanan, seperti melakukan tertib administrasi kependudukan.

Upaya mewujudkan perdamaian dan harmoni sosial juga disokong dengan lembaga keamanan yang dimiliki oleh desa, seperti pecalang dan Bantuan Keamanan Desa (Bankamdes). Pecalang di Desa Pemogan bukan hanya berperan dalam menjaga keamanan desa dan membantu melakukan penertiban penduduk pendatang, namun juga turut terlibat dalam menjaga kelancaran kegiatan hari raya umat lain, seperti

perayaan Idul Fitri dan Idul Adha serta menjadi pihak keamanan pondok pesantren di Desa Pemogan, yakni Pondok Pesantren Hidayatullah. Ini menunjukkan bahwa *menyama braya* telah menumbuhkan toleransi dan mendorong kerjasama antar umat beragama. Selain itu, *menyama braya* juga mempersatukan masyarakat Hindu dan Islam dalam Bankamdes untuk secara bersama-sama waspada menghadapi ancaman konflik demi terciptanya suasana yang aman dan damai. Upaya preventif ini dilakukan dengan patroli rutin oleh anggota Bankamdes ke setiap banjar setiap hari dari pukul sembilan malam hingga pukul lima pagi. Dengan patroli ini, Bankamdes dapat memantau kondisi setiap banjar sehingga jika ada hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan dapat dideteksi secara dini dan segera ditanggapi, seperti misalnya pemuda yang mabuk-mabukan di pinggir jalan dapat segera diamankan. Anggota Bankamdes dan Linmas juga berjaga 24 jam di kantor kepala desa sehingga selalu siaga jika ada masyarakat yang menyampaikan pengaduan terkait ketertiban dan keamanan desa.

Pembangunan ketahanan masyarakat terhadap konflik dengan memperkuat *menyama braya* juga

dilakukan oleh Desa Pemogan melalui Pekan Olahraga Desa (Pordes) yang rutin diadakan setiap tahun. Kegiatan ini memungkinkan warga banjar bersatu sebagai tim dan bekerjasama untuk mengalahkan banjar lain dalam rangkaian lomba tradisional yang bertujuan merekatkan *penyamabrayaan* pada masyarakat sehingga tercipta kehidupan damai dan harmonis. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperkuat *menyama braya* adalah pembinaan generasi muda melalui *sekaa teruna* di setiap banjar. Melalui *sekaa teruna* inilah generasi muda yang merupakan kelompok rentan dapat dibina dan dididik untuk melestarikan budaya Bali dan mempertahankan ikatan *penyamabrayaan* yang kuat. Tokoh adat memiliki peranan penting untuk menyebarkan semangat *menyama braya* dan mengajarkan gotong royong pada warga melalui tradisi lisan secara turun temurun. Sosialisasi tentang *menyama braya* juga dilakukan di tingkat banjar kepada pendatang ketika membuat Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) atau saat terjaring sidak. Momentum semacam itu dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran bagi warga pendatang untuk turut serta menjaga ketertiban dan keamanan desa.

Jika suatu konflik tidak terselesaikan pada tingkat desa maupun terdapat kejadian konflik yang melibatkan antar desa, maka penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terdiri dari camat, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), dan Komandan Rayon Militer (Danramil). Pada tingkat yang lebih tinggi, yakni tingkat pemerintah kota, upaya pencegahan konflik dilakukan dengan menyorot faktor-faktor penyebab konflik. Menurut Lund metode pencegahan konflik disesuaikan dengan tingkat awal konflik, seperti misal pada tataran konflik laten, pencegahan dapat dilakukan melalui langkah-langkah struktural dan langsung yang ditunjukkan untuk mengentaskan sumber-sumber sosial-ekonomi.¹¹ Di Denpasar, permasalahan adat sering kali dapat menimbulkan konflik di masyarakat sehingga pemerintah kota Denpasar berusaha untuk melakukan upaya penguatan peran tokoh adat dalam organisasi *upadesa* yang dibantu oleh majelis utama desa pakraman (tingkat provinsi), majelis madya desa pakraman

¹¹ Michael S. Lund, "Conflict Prevention: Theory in Pursuit of Policy and Practice", dalam Jacob Bercovitch, Victor Kremenjuk, I William Zartman, The SAGE Handbook of Conflict Resolution, Sage, London, 2009

(kota), dan majelis alit desa pakraman (kecamatan). Langkah lain yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan struktural adalah program Subak Lestari yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk mencegah terjadinya konflik lahan. Pemerintah Kota Denpasar juga mendorong peningkatan keahlian generasi muda, membuka peluang kerja melalui *job fair*, dan pelatihan UKM agar penduduk lokal dapat bersaing secara ekonomi dengan pendatang. Kebijakan semacam ini diharapkan mampu menimalisir kesenjangan sosial ekonomi antar penduduk lokal dan pendatang yang dapat menjadi faktor struktural penyebab konflik di kemudian hari.

Pemerintah kota Denpasar juga menjadikan desa pakraman, perangkat desa, tokoh-tokoh agama, dan tokoh adat sebagai agen pendeteksi konflik. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, dan tenaga ahli juga dihimpun dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sehingga ada kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ancaman konflik. Salah satu bentuk kewaspadaan dini dalam menghadapi ancaman konflik adalah dengan meluncurkan aplikasi *Pro Denpasar Plus* di *smart phone* yang memungkinkan

masyarakat untuk melaporkan segala kejadian yang dihadapi mereka sehingga pemerintah kota dapat bertindak responsif dengan menurunkan satuan kerja yang dibutuhkan. Hal serupa juga dapat dilakukan melalui *whatsapp group* Pro Denpasar. Upaya mewujudkan perdamaian dan harmoni sosial juga dilakukan secara inklusif dengan melibatkan tokoh semua agama dan paguyuban etnis yang ada di Bali. Hal ini didukung dengan adanya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Denpasar yang mewadahi multikulturalisme di mana tokoh semua etnis yang ada saling bersatu dalam semangat persaudaraan untuk menciptakan harmoni sosial. Jika ada permasalahan antar etnis, tokoh-tokoh etnis inilah yang dirangkul oleh pemerintah kota untuk menyelesaikannya. Hal ini tentu saja memanfaatkan kekuatan dari para tokoh etnis yang dapat didengar dan dipatuhi oleh anggota kelompoknya sehingga meski Denpasar terdiri dari masyarakat plural, mereka tetap dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Lembaga lain yang berperan besar dalam pengelolaan perdamaian pada masyarakat multikultur adalah Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB). FKUB menjadi *leading sector* pembinaan kerukunan umat beragama yang dapat menyebarkan semangat *menyama braya* dalam setiap kegiatannya untuk mewujudkan kehidupan antar umat beragama yang saling toleran, rukun, dan harmonis. FKUB Bali juga mengeluarkan kesepakatan antar tokoh agama yang memanfaatkan eratnya rasa persaudaraan antar umat untuk saling menjaga keamanan semua tempat ibadah yang ada di Bali. Selain itu, FKUB juga berupaya menanamkan *menyama braya* kepada generasi muda dengan membentuk Forum Generasi Muda Lintas Agama (Forgimala) dan Forum Perempuan Lintas Agama (Forpela) sehingga kesadaran hidup berbhineka tunggal ika dan upaya pembangunan kerukunan sudah dimulai sedini mungkin oleh pemuda dan pemudi. Hal ini tentu saja dapat mengurangi kerentanan pemuda terhadap ancaman konflik dan mempersiapkan generasi penerus yang memiliki kewaspadaan dan kapasitas dalam membina kerukunan antar umat beragama.

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan untuk mencapai keamanan nasional, saat ini Gema Perdamaian menjadi acara yang rutin yang menggandeng semua unsur dalam

masyarakat untuk saling berbaur tanpa memandang etnis dan agama dalam kemeriahan pagelaran budaya dan khidmatnya lantunan doa-doa. Gema Perdamaian menjadi symbol untuk mengingatkan agar masyarakat Indonesia tetap selalu waspada dan melakukan tindakan preventif untuk mencegah konflik yang memecah belah bangsa. Acara semacam ini dapat memperkuat *menyama braya* yang ada pada masyarakat karena dapat mempersatukan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan etnis, adat-istiadat, maupun agama. Acara ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga *menyama braya* meski ada perbedaan etnis, ras, agama, dan warna kulit sehingga masyarakat senantiasa hidup dalam persatuan dan mencapai hidup yang damai serta harmonis dalam keragaman.

Kesimpulan

Menyama braya merupakan kearifan lokal masyarakat Bali yang mengandung nilai-nilai budaya damai seperti solidaritas, kerjasama, toleransi, kebebasan, menerima pluralisme dan keragaman budaya, dan penghormatan penuh terhadap HAM dan kebebasan

fundamental. *Menyama braya* dapat menjadi modal sosial yang berfungsi memperkuat solidaritas antar sesama masyarakat Bali (*bonding*) sehingga kohesi sosial semakin tebal dan menjembatani hubungan serta membuka ruang kerjasama dengan masyarakat dari etnis dan agama lain di Bali (*bridging*). Modal sosial tersebut sangat penting dalam menciptakan ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman konflik. Selain itu, *stakeholders* dari tingkat desa, kota, hingga lembaga yang mewadahi multikulturalisme seperti FKUB

dan FPK juga memiliki peranan masing-masing dalam pencegahan dan resolusi konflik namun dapat saling bersinergi untuk mewujudkan perdamaian dan harmoni sosial di Bali. Pada akhirnya, modal sosial yang mampu membangun ketahanan masyarakat terhadap konflik harus dibarengi oleh peran aktif para pemangku kepentingan dalam memperkuat modal sosial tersebut dan merumuskan strategi pencegahan dan resolusi konflik yang tepat untuk mencapai masyarakat yang damai dan harmonis.

Daftar Pustaka

- Atmadja, N. B. (2010). *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Dewanto, A., & Utari, R. (2006). Pemberdayaan Modal Sosial dalam Manajemen Pembiayaan Sekolah. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, 25-33.
- Haba, J. (2008). Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso. Dalam I. M. Irwan Abdullah, *Agama dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hawkins, R. L., & Maurer, K. (2009). Bonding, Bridging and Linking: How Social Capital Operated in New Orleans following Hurricane Katrina. *British Journal of Social Work*, Vol. 40, 1777-1793.
- Jeong, H. W. (2008). *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. London: SAGE Publications Ltd.
- Lund, M. S. (2009). Conflict Prevention: Theory in Pursuit of Policy and Practice. In J. Bercovitch, V. Kremenyuk, I. W. Zartman, & (eds), *The SAGE Handbook of Conflict Resolution* (pp. 287-308). London: Sage.

- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Shuster.
- Suryawan, I. N. (2005). *Bali, Narasi dalam Kuasa: Politik & Kekerasan di Bali*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Trisila, S. (2015). Masyarakat Islam di Bali dalam Lintasan Historis. In A. D. Girindrawardani, S. Trisila, & (ed), *Membuka Jalan Keilmuan Kusumanjali 80 Tahun: Prof. Dr. Anak Agung Gde Putra Agung, S.U.* Denpasar: Pustaka Larasan.
- Wijayanti, P. A., & Rokhman, A. (2011). Kearifan Lokal sebagai Bagian dari Demokrasi dan Pembangunan di Indonesia. *Seminar Nasional FISIP-UT*, (pp. 607-622).